

Tinjauan Aspek Ekonomi dan Strategi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap

Dahlan

Universitas Muslim Maros
habbadahlan@gmail.com

Nurdin Dalya

Universitas Hasanuddin
nurdindalya@unhas.ac.id

Afriyani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara
afriyani.ilyas01@gmail.com

Tri Sulkarnain Ahmad

Universitas Tomakaka Mamuju
trisulkarnainahmad@ymail.com

Abstract

How to actually manage natural resources that provide maximum welfare for the community is an important question that we try to uncover through this research. Management of natural resources, especially forestry in Sidrap Regency is based on the wealth of forest resources which is relatively small compared to other districts in South Sulawesi, which is only 1.8% of the total forest area of South Sulawesi. However, the forest area has an important meaning for the people of Sidrap Regency and the surrounding areas because from an area of 188,325 ha, there is a forest area of 68,810.8 ha or about 36.5% of the total area. The research locations are villages representing forest conditions in the eastern part (Latimojong Forest Complex) and those representing the western part (Nepo-nepo Forest Complex) Sidrap Regency. The units of analysis in this study are: community groups that are directly involved in forest management activities, namely community leaders, traditional leaders, religious leaders and environmentalists and community groups that are not directly involved in forest management, namely DPRD members, youth leaders and NGOs. Information was collected through the contemplation process of the community who knew the concepts and practices of forest management expressed by the informants. The review of the economic aspect is seen based on the results of qualitative and quantitative analysis of the condition of forest resources and the implementation strategy is carried out using a SWOT analysis. The results of the study reveal that the economic aspect of forest resources is that the forest is managed as a producer of water and environmental services for the economic sustainability of downstream communities in Sidrap Regency. Meanwhile, the management implementation strategy refers to the management of protected forest areas for the main purpose of producing water and other non-timber forest products. Another strategy is to develop cross-district cooperation in

the management of forest resources for water production, develop cultural and tudang sipulung conservation programs related to forest function preservation, develop forestry institutions at the local level according to the values that exist in the local community and increase public understanding. on the function of forest water management. Sustainable SDH management in Sidrap Regency needs to apply locality approaches. Restructuring of district forestry institutions should also be pursued in order to create intensive coordination between sectors, especially between the forestry sector and sectors related to water.

Keywords: *Economy, Strategy, Forest Resources, Sustainability*

A. PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam merupakan faktor *input* dalam kegiatan ekonomi (Fauzi, 2006). Sumber daya alam menghasilkan barang dan jasa untuk proses industry yang berbasis sumber daya alam maupun yang langsung dikonsumsi oleh rumah tangga. Potensi lahan Kabupaten Sidrap memberi peluang yang besar untuk menjadi pusat produksi Pertanian. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Sidrap sebagai sentra agribisnis di Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan sektor Pertanian, maka sektor kehutanan memiliki potensi yang sama untuk dikembangkan. Bahkan jika dikaji dari segi ekologi (siklus hidrologi) maka pembangunan Pertanian hanya akan berjalan secara kontinu jika dibarengi dengan pembangunan sektor kehutanan. Air irigasi yang sangat vital bagi usaha Pertanian hanya dapat tersedia secara berkelanjutan jika hutan sebagai agen pengendali siklus air dapat dibangun dan dipertahankan eksistensinya.

Bonus demografi diasumsikan dapat mendorong perekonomian nasional melalui pertumbuhan tenaga kerja produktif. Dalam kasus Indonesia, bonus demografi belum dioptimalkan secara maksimal karena kebijakan pemerintah yang masih setengah hati. Ekonomi Indonesia tumbuh melalui konsumsi kelas menengah yang didapat dari bonus demografi. Namun konsumsi perlu diimbangi dengan produktivitas sehingga Indonesia terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (Jati, 2015). Sumber daya alam Kabupaten Sidrap mempunyai peran strategis mendukung visi dan misi Kabupaten Sidrap yaitu “Mewujudkan Sidenreng Rappang Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, mandiri, berbudaya dan Religius. Disisi lain kondisi sumber daya alam hutan Kabupaten Sidrap saat ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan peran strategis yang ditunjukkan oleh terjadinya banjir di musim penghujan, gagal panen akibat kekeringan di musim kemarau, terjadinya perambahan dan penyerobotan kawasan hutan dan meluasnya lahan kritis. Salah satu faktor penyebabnya adalah program, kegiatan-kegiatan pengolahan hutan di Kabupaten Sidrap selama ini belum mengacu kepada suatu konsep Aspek ekonomi. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana melihat secara utuh aspek ekonomi pengelolaan SDH dan strategi implementasi keberlanjutan agar dapat melestarikan sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Sidrap. Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan pembangunan di sektor kehutanan adalah menekan tingkat kemiskinan di sekitar hutan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat desa hutan bisa diukur

dengan keterpenuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di suatu kawasan hutan (Sukwika, 2018)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah institusi yang mempunyai tugas dan fungsi pengurusan dan penyelenggaraan kehutanan di Kabupaten Sidrap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, telah disusun Rencana Strategi dan program-program yang diarahkan kepada upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidrap. Dengan demikian, eksistensi program dan kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Sidrap belum mengacu kepada suatu konsep pembangunan ekonomi yang disebut sebagai Aspek ekonomi Kehutanan Kabupaten Sidrap. Berdasarkan uraian di atas, dilakukan suatu penelitian yang mengkaji tentang bagaimana aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap, yang diharapkan yang akan menjadi acuan bagi seluruh aktifitas yang terkait dengan kehutanan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan utama dalam merumuskan aspek ekonomi Kehutanan Kabupaten Sidrap berdasarkan faktor-faktor kondisi ekonomi, budaya masyarakat serta potensi yang ada serta strategi implementasi melalui pengembangan kelembagaan kehutanan yang visioner berdasarkan aspek ekonomi yang telah dirumuskan di atas.

C. METODOLOGI

Tempat dan Waktu

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Sidrap pada bulan Januari sampai dengan April 2020. Lokasi penelitian adalah desa-desa yang mewakili kondisi hutan di wilayah bagian Timur (Kompleks Hutan Latimojong) dan yang mewakili kondisi bagian Barat (Kompleks Hutan Nepo-nepo) Kabupaten Sidrap. Desa-desa tersebut adalah Desa Batu, Leppangeng, Betao Riase dan Ottingge di wilayah Kompleks Hutan Latimojong dan Desa Bilokka, Lajonga, Cenrana dan Arawa Kompleks Hutan Nepo-nepo.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah : kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan hutan, masing-masing sebanyak dua orang. Informasi digali melalui proses kontemplasi (proses renungan) masyarakat yang mengetahui konsep dan praktek pengelolaan hutan yang diekspresikan oleh informan

Analisis Data

Untuk merumuskan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap dilakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif kondisi sumber daya hutan serta kondisi masyarakat secara umum. Hasil analisis tersebut menjadi masukan untuk selanjutnya dilakukan analisis isi (content analysis) melalui diskusi partisipatif. Untuk merumuskan strategi implementasi keberlanjutan, dilakukan analisis SWOT (Kearns dalam Salusu 1996).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Ekonomi Sumber Daya Hutan

Hutan dipandang sebagai ekosistem kompleks yang harus dikelola sedemikian rupa secara bijaksana sebagai bagian dari bentang alam sehingga diperoleh keseimbangan antara barang dan jasa disamping mengurangi kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, hutan dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia di masa kini maupun yang akan datang (Iskandar, 1999). Potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu Kabupaten Sidrap relatif kecil. Jenis-jenis yang mendominasi kawasan hutan adalah Bitti, Nyato, Kayu Hitam, Jati, dan rimba campuran. Pada kawasan hutan yang dirambah masyarakat terdapat jenis-jenis tanaman perkebunan seperti, kemiri, coklat dan Cengkeh. Disamping itu terdapat pula hasil hutan bukan kayu yang mempunyai potensi seperti rotan, damar, aren, dan air. Khusus hasil hutan air, kawasan hutan Kabupaten Sidrap mempunyai fungsi tata air penting bagi aktivitas ekonomi bukan hanya bagi masyarakat Kabupaten Sidrap tetapi juga masyarakat kabupaten lain di sekitarnya. Menurut Arsyad (2004) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk maupun perubahan struktur ekonomi.

Produksi hasil hutan bukan kayu rotan selama tahun 2000 s/d 2003 sebesar 6.905 ton, sedangkan produksi hasil hutan kayu yang tercatat adalah produksi hutan rakyat sebesar 996,52 m³. Produksi hasil hutan langsung (tangible) yang relatif kecil tersebut disebabkan karena sebagian besar (57,4%) kawasan hutan Kabupaten Sidrap adalah kawasan dengan fungsi lindung dengan tujuan utama untuk produksi jasa (konservasi tanah dan air). Sedangkan kawasan hutan produksi seluas 28.778,2 ha (41,8%) yang diharapkan sebagai sumber kayu, potensinya relative kecil. Dari segi kualitas hutannya, berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2003, Kabupaten Sidrap memiliki lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 30.034 ha atau sebesar 43,6% dari total luas kawasan hutan, yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan kualitasnya. Penyebaran luas kawasan hutan dan lahan kritis dalam kawasan hutan di Kabupaten Sidrap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Sidrap.

No.	Kecamatan	Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan (ha)	Persentase Luas Lahan Kritis (%)	Keterangan
1.	Panca Lautang	3.700	12,3	Kompleks Hutan Nepo-Nepo
2.	Tellu Limpoe	2.325	7,7	Kompleks Hutan Nepo-Nepo
3.	Watrang Pulu	3.700	12,3	Kompleks Hutan Nepo-Nepo

5.	Panca Rijang/Kulo	200	0,7	Kompleks Hutan Alekaraja
5.	Pitu Riase	18.609	62,0	Kopleks Hutan Latimojong
6.	Pitu Riawa	1500	5,0	Kopleks Hutan Latimojong
	Jumlah	30.034	100,0	-

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lahan kritis di dalam kawasan hutan Kabupaten Sidrap paling luas terdapat di Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa. Dikaitkan dengan penyebaran kawasan hutan, sebagian besar kawasan hutan Kabupaten Sidrap terdapat di kedua kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Pitu Riase seluas 50.072,17 ha (73%) dan Kecamatan Pitu Riawa seluas 5.060,01 ha (7,4%). Kawasan hutan lainnya tersebar di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, dan Kecamatan Kulo dengan luasan yang relatif kecil. Kawasan hutan yang berada dalam kondisi kritis pada kedua kecamatan tersebut masing-masing 37,2% dan 29,6%. Upaya penanggulangan lahan kritis melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi selama ini dapat menekan laju pertambahan lahan kritis di Kabupaten Sidrap meskipun dalam luasan yang kecil. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunana Kabupaten Sidrap, luas lahan kritis di dalam kawasan hutan pada awal tahun 2003 seluas 30.034 ha, yang lebih kecil dibanding luas lahan kritis pada tahun 1999 yakni seluas 30.589 ha. Hal ini berarti bahwa kegiatan rehabilitasi yang dilakukan selama lima tahun terakhir hanya mampu mengurangi luas lahan kritis seluas 555 ha atau sebesar 1,81%.

Pengusahaan hutan di Kabupaten Sidrap lebih banyak berorientasi kepada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yaitu, pemungutan rotan, damar, madu dan pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk usahatani persurteraaan alam. Disamping itu terdapat pula areal hutan rakyat seluas 6.719 ha yang merupakan urutan keempat terluas dari luas hutan rakyat di Sulawesi Selatan, serta areal hutan kemasyarakatan seluas 1.000 ha yang potensial dikembangkan dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Sidrap. Produksi rotan Kabupaten Sidrap selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 1.390 ton/tahun yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 200 orang/tahun dan dikelola oleh enam pemegang izin pemungutan rotan. Jika dibandingkan dengan produksi rata-rata rotan Sulawesi Selatan yakni sebesar 8.940,296 ton/tahun, maka produksi rotan Kabupaten Sidrap hanya 15,5% dari propduksi rotan Sulawesi Selatan. Sedangkan produksi kayu dari hutan rakyat rata-rata sebesar 199,304 m³ /tahun. Perkembangan produksi rotan dan kayu Kabupaten Sidrap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi Rotan dan Kayu Kabupaten Sidrap Selama Empat Tahun Terakhir

No.	Tahun	Produksi	
		Rotan (ton)	Kayu (m ³)
1.	2017	3.125	108,79
2.	2018	1.650	383,00
3.	2019	1.225	253,48
4.	2020	905	251,25
	Jumlah	6.905	996,52

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Usahatani persuteraan alam juga berkembang di Kabupaten Sidrap walaupun perkembangannya berfluktuasi. Jumlah petani sutera alam pada tahun 2020 sebanyak 133 KK, dengan luas lahan usaha seluas 110 ha, dengan tingkat produksi kokon rata-rata sebesar 6.845,75 kg/tahun. Perkembangan usaha sutera alam selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Areal dan Produksi Sutera Alam Kabupaten Sidrap

No.	Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi Kokon (kg)	Produksi Benang (kg)	Jumlah Petani (KK)
1.	2016	90	8.000	875	85
2.	2017	132	10.123	1.262	140
3.	2018	93	8.200	900	101
4.	2019	103	5.563,6	786,24	108
5.	2020	110	2.342,15	410,7	133

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020.

Data pada Tabel 3 menunjukkan fluktuasi usahatani sutera alam di Kabupaten Sidrap. Namun demikian, usahatani sutera alam sulit ditinggalkan oleh masyarakat karena selain merupakan budaya masyarakat, usahatani sutera alam juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani. Penyuluhan pertanian memainkan sejumlah peran penting dalam pertumbuhan dan transformasi sektor pertanian, termasuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan serta mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi (Balana, 2010). Industri kehutanan di Kabupaten Sidrap terdiri atas industri penggergajian, kuseng, pengolahan rotan dan bambu, dan meubel kayu. Keadaan industri kehutanan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Keadaan Industri Kehutanan Kabupaten Sidrap, Tahun 2020

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai Bahan Baku (Rp.000)
Penggergajian	32	96	240.002	681.047	304.699
Kuseng	10	62	169.670	548.432	298.014
Rotan/Bambu	36	76	84.200	140.812	62.299
Meubel	114	562	456.807	1.104.155	700.042
Pemintalan	79	201	173.394	149.630	89.162
Sutera					
Pertenunan	1.256	2.300	445.498	799.883	460.536
Sutera					
Jumlah	1.527	3.297	1.569.571	3.423.959	1.914.752

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2020

Industri kehutanan memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi di Kabupaten Sidrap. Hal ini antara lain dapat dilihat dari penyerapan tenaga yang cukup besar yaitu sebesar 3.297 orang. Disamping itu, nilai investasi dan nilai produksi berdampak kepada PDRB Kabupaten Sidrap.

Konsep-konsep Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat

Pengelolaan sumber daya alam bersama umumnya diimplementasikan di bawah model kelembagaan yang mempromosikan pengambilan keputusan yang dilimpahkan, seperti pengelolaan bersama dan pengelolaan berbasis masyarakat (Gurney, 2016). Berikut ini konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat di lokasi penelitian :

Hutan Sebagai Areal Perburuan

Hutan sejak dahulu telah digunakan oleh masyarakat terutama raja-raja sebagai tempat untuk berburu. Di Kompleks Hutan Latimojong, yaitu di sekitar wilayah Barukku, Desa Batu, Kecamatan Pitu Riase dikenal istilah *Kabo Lura*, yaitu kawasan hutan seluas 500 ha yang dikuasai oleh raja (Arung Batu) untuk berburu rusa. Kawasan tersebut, saat ini telah menjadi areal HGU PT. Buli. Disamping itu dikenal pula istilah *Kabo Asa*, yaitu kawasan hutan seluas 500 ha yang dikuasai oleh raja (Arung Ottingi) sebagai tempat berburu rusa. Kawasan hutan tersebut dijaga ketat dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa seizin raja. Masyarakat yang mengambil hasil hutan pada kawasan *Kabo Asa* tanpa seizin raja dikenakan hukuman. Kawasan hutan *Kabo Asa* saat ini telah berubah menjadi areal perkebunan kakao dan cengkeh oleh rumpun keturunan raja. Raja/Arung Addituang Lasaddang Patto juga memiliki kawasan hutan yang dilindungi untuk keperluan berburu yang disebut "*Alae La Cekkang*", yang terletak di pinggir Danau Sidenreng. Hutan tersebut saat ini telah dibagi-bagi masyarakat dan dijadikan sebagai areal persawahan dan kebun.

Hutan Sebagai Sesuatu yang Sakral/Keramat

Di Kompleks Hutan Latimojong terdapat kawasan hutan bekas wilayah kerajaan Batu, yang disebut Cendana I dan Cendana II seluas 200 ha, dikeramatkan masyarakat sejak dahulu sampai saat ini. Oleh karena itu, orang yang akan mengambil hasil hutan pada kawasan tersebut harus Mappasabbi dengan cara minta izin kepada penguasa hutan yang dilakukan oleh Sanro. Mengambil hasil hutan tanpa melakukan Mappasabbi, dapat berakibat tidak ditemukannya hasil hutan yang akan diambil, kehilangan jejak dalam kawasan hutan, atau bahkan sakit sampai meninggal. Pandangan ini masih diyakini oleh sebagian masyarakat, sehingga kondisi kawasan hutan di lokasi tersebut saat ini masih terjaga.

Hutan sebagai Tempat Pemujaan

Hutan juga mempunyai makna religius bagi masyarakat Kabupaten Sidrap pada zaman dahulu. Pada zaman Kerajaan Arung Ottinge, dikenal istilah Topa, yaitu kawasan hutan seluas 600 ha yang dijadikan sebagai tempat pemujaan untuk meminta berkah kepada Tuhan oleh masyarakat di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa. Kawasan tersebut saat ini termasuk kawasan hutan produksi terbatas pada wilayah Kompleks Hutan Latimojong. Aktivitas masyarakat tidak lagi digunakan untuk pemujaan tetapi telah dikonversi menjadi areal perkebunan dan areal tanaman semusim. Di Coppo Sulureng, Kompleks Hutan Nepo-Nepo juga terdapat kawasan hutan seluas 500 ha yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pemujaan (berhala) yang disebut Hutan Topano. Kawasan tersebut saat ini telah dikelola sebagai areal kebun dan sawah oleh masyarakat.

Hutan Sebagai Sumber Air

Falsafah “Wae Sisero Passalamai Taneng-tanenge” (air setimba yang menyelamatkan tanaman) menunjukkan begitu tingginya nilai air bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sidrap memahami bahwa fungsi pengaturan air dari hutan sangat penting terutama pada musim kemarau. Sebagai contoh, air Sungai Bilokka mengalir sepanjang tahun pada saat hutan di wilayah hulunya masih utuh (zaman kerajaan), akan tetapi setelah kawasan hutan di hulu rusak akibat penggunaan yang tidak sesuai (zaman kemerdekaan), maka hal itu tidak terjadi lagi. Berdasarkan falsafah dan pengalaman masyarakat tersebut, maka masyarakat (terutama di wilayah sentra penghasil padi) selalu mendambakan hutan di sekitarnya terjaga. Konsep Wae Sisero sejalan dengan falsafah air yaitu datang pada saat yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan, pada kualitas yang dibutuhkan.

Hutan Sebagai Sumber Kayu

Hutan bagi masyarakat Kabupaten Sidrap adalah sumber pendapatan. Sejak dahulu masyarakat telah memanfaatkan hasil-hasil hutan kayu seperti Cenrana, Bayam, Bitti, dan rimba campuran terutama untuk keperluan ramuan rumah. Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, damar, madu, aren dan buah-buahan juga telah dimanfaatkan masyarakat, secara subsistem. Pada zaman pemerintahan raja-raja, dikenal beberapa kelompok hutan yang

dijadikan sebagai sumber pendapatan raja seperti Hutan La Betti yang dikuasai oleh Raja/ Arung Petta Pa'Bicara, Hutan La Pattapo di wilayah Tellu Limpoe dahulu dikuasai oleh Raja La So'ni Karaeng Massepe, Hutan La Cekkang yang berada di pinggir Danau Sidenreng, dan Hutan Aliri Ajue yang dikuasai oleh Arung Andi Langki di wilayah sekitar Belokka, Kecamatan Panca Lautang. Kawasan hutan yang dikelola raja-raja tersebut saat ini sebagian besar kondisinya kritis, berubah menjadi pemukiman, areal perkebunan, dan lahan kosong.

Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, tekanan masyarakat terhadap hutan semakin tinggi. Interaksi masyarakat dengan hutan tidak lagi bersifat subsistem, tetapi sudah berorientasi komersial. Kondisi ini terjadi setelah system pemerintahan kerajaan di Kabupaten Sidrap digantikan dengan system pemerintahan yang ada setelah kemerdekaan. Tekanan sumberdaya hutan sangat nyata terjadi di Kompleks Hutan Nepo-Nepo, dimana kawasan hutan sebagian besar dalam kondisi kritis akibat intensifnya kegiatan perladangan masyarakat. Sedangkan di Kompleks Hutan Latimojong, kondisi hutan relatif masih terjaga. Hutan kemasyarakatan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial-budaya, dan ekologis kepada masyarakat pedesaan, namun timbul kritik bahwa hutan kemasyarakatan masih didominasi oleh pengambilan keputusan di luar kantor ahli dan teknik manajemen yang tidak sesuai untuk beberapa komunitas (Hajjar, 2013).

Hutan Sebagai Kawasan Perlindungan

Hutan sebagai kawasan perlindungan dapat dilihat pada konsep *Toga*. *Toga* adalah istilah untuk batas kawasan hutan pada zaman dahulu. *Toga* dapat berupa jalan yang mengelilingi hutan atau gundukan batu sebagai tanda batas terluar yang diizinkan untuk melakukan aktivitas terhadap kawasan hutan. Kawasan hutan yang berada di dalam *toga* tidak bisa diganggu oleh masyarakat. *Toga* adalah salah satu bentuk kelembagaan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Kompleks Hutan Latimojong yang ditatati oleh masyarakat pada zaman Belanda sampai pemerintahan Swapraja. Pada saat ini, *Toga* telah diganti oleh pemerintah (institusai kehutanan) menjadi patok-patok kawasan hutan.

Beberapa falsafah hidup masyarakat Kabupaten Sidrap yang terkait dengan pengelolaan hutan adalah sebagai berikut:

“Resopa temmanginggi namalomo naletei pammase dewatae”;

“Menanami pohon pada tanah kosong tanpa kenal menyerah”;

“Wae Sisero Pasalamai Taneng-tanenge”;

“Taro ada taro gau (satu katadengan perbuatan)”

Jangan mengambil kayu yang disandarkan kalau bukan kamu yang sandarkan. Jangan mengambil kayu yang sudah dipotong kedua ujungnya kalau bukan kau yang memotong. Falsafah untuk menghindari pencurian hasil hutan. Falsafah hidup tersebut di atas adalah falsafah yang dianut oleh masyarakat dahulu, yang perlu digali dan diambil nilainya untuk diterapkan pada aktivitas pengelolaan hutan berkelanjutan.

Ketergantungan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan

Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan di Kompleks Hutan Latimojong berbeda dengan Kompleks Hutan Nepo-Nepo. Hal ini terkait dengan kondisi bio-fisik hutan dan latar belakang sejarah masyarakat. Kawasan hutan di Kompleks Hutan Latimojong yang terletak di bagian Timur Kabupaten Sidrap, sebagian besar (68,7%) adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung sehingga mempunyai fungsi tata air penting di Kabupaten Sidrap. Kompleks hutan ini merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila, yang airnya mengalir sampai ke Danau Sidenreng dan Danau Tempe. Disamping itu, juga merupakan salah satu sumber air penting bagi aktivitas usahatani (khususnya persawahan) di Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riawa, Maritenggae, Watang Sidenreng dan Dua Pitue. Luas areal persawahan yang disuplai air dari Kompleks Hutan Latimojong disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Keadaan Areal Sawah yang Disuplai Air dari Kompleks Hutan Latimojong

No.	Kecamatan	Luas Sawah (ha)	Produksi Padi (ton)
1.	Pitu Riase	2.805,66	28.226,12
2.	Pitu Riawa	5.182,94	81.127,74
3.	Maritenggae	5.720,70	63.733,55
4.	Watang Sidenreng	6.117,08	75.280,73
5.	Dua Pitue	5.834,40	62.242,18
	Jumlah	25.660,78	310.610,32

Sumber: Kabupaten Sidrap Dalam Angka, 2002.

Data pada Tabel 5. menunjukkan sebagian besar (54,60%) areal persawahan Kabupaten Sidrap disuplai air dari Kompleks Hutan Latimojong, demikian pula produksi padi (70,80%). Dengan demikian, kawasan hutan di Kompleks Hutan Latimojong berdampak sosial ekonomi penting bagi masyarakat Kabupaten Sidrap. Disamping fungsi tata air, kawasan hutan di Kompleks Hutan Latimojong juga merupakan sumber hasil hutan kayu dan bukan kayu serta areal kebun masyarakat. Kompleks Hutan Nepo-Nepo yang terletak di bagian Barat Kabupaten Sidrap, seluruhnya adalah kawasan hutan produksi seluas 11.838 ha. Kondisi penutupan vegetasi didominasi dengan semak belukar dan lahan kosong, dengan luas lahan kritis dalam kawasan hutan Nepo-Nepo seluas 9.725 ha atau sebesar 32,38% dari total luas lahan kritis yang ada dalam kawasan hutan. Kondisi ini disebabkan tingginya interaksi masyarakat dengan kawasan hutan dalam bentuk aktivitas perladangan dan perkebunan. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu dan bukan kayu relatif kecil, demikian pula suplai air. Aktivitas persawahan masyarakat disuplai air dari Daerah Irigasi Saddang dan tadah hujan.

Berdasarkan uraian Aspek Ekonomi tersebut, diketahui besarnya peranan sumberdaya hutan terhadap aktivitas ekonomi dalam hal penyediaan air dan hasil hutan bukan kayu lainnya untuk keberlanjutan usahatani masyarakat. Peranan ekonomi tersebut tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Sidrap, tetapi juga bagi masyarakat kabupaten lain yang di daerah hilir. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sumberdaya hutan dapat lestari pada zaman kerajaan dahulu karena memberikan manfaat langsung kepada raja/arung dan masyarakat setempat dalam bentuk hasil hutan kayu, hasil buruan, rotan, damar, dan bahkan di tempat-tempat tertentu hutan juga memberikan manfaat religius kepada masyarakat, melalui suatu system pengurusan hutan yang diatur oleh raja. Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kondisi aktual sumberdaya hutan dan masyarakat Kabupaten Sidrap dan masyarakat kabupaten lain di wilayah hilirnya maka dirumuskan nilai ekonomi pengelolaan kehutanan di Kabupaten Sidrap, yaitu Hutan dimanfaatkan sesuai keperluan tetapi satu yang tidak boleh dilupakan (prasyarat utama) yaitu penyediaan air dengan jumlah, kualitas dan waktu yang diperlukan.

Strategi Implementasi Keberlanjutan

Strategi untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap disusun berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan internal yang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) dan analisis kondisi lingkungan eksternal yang meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Urutan penilaian aspek mana yang harus didahului tergantung dari kesiapan penilai dan kelengkapan data yang ada (Amri, 2011).

A. Analisis Kondisi Lingkungan Internal

Dari hasil penelitian diperoleh kondisi lingkungan internal berupa kelemahan untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap, namun juga terdapat beberapa kekuatan, sebagai berikut:

Kekuatan :

Beberapa faktor yang dapat dipandang sebagai kekuatan untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap adalah:

- 1) Visi, misi Kabupaten Sidrap mendukung
- 2) Komitmen pemerintah mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan
- 3) Kewenangan pemerintah kabupaten mengatur kelembagaan kehutanan di kabupaten

Kelemahan :

Beberapa hal yang dianggap kelemahan untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap adalah:

- 1) Perencanaan makro kabupaten yang lintas sektoral belum tersedia
- 2) Struktur organisasi belum operasional sampai di tingkat desa
- 3) Koordinasi dengan sektor lain kurang baik pada saat perencanaan maupun operasional kegiatan di lapangan

- 4) Pelayanan publik di desa tidak tersedia
- 5) Perencanaan kehutanan masih sektoral

B. Analisis Kondisi Lingkungan Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran faktor-faktor berupa peluang dan ancaman untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

Peluang :

Beberapa hal yang dikategorikan sebagai peluang untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap adalah:

- 1) Kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan kerjasama lintas kabupaten dalam mengelola sumberdaya hutan
- 2) Kawasan hutan fungsi lindung yang dominan di Kabupaten Sidrap
- 3) Ketergantungan masyarakat terhadap air untuk aktivitas usahatani tinggi
- 4) Keinginan masyarakat terutama rumpun masyarakat adat/kerajaan untuk mengembalikan pengurusan hutan seperti pada zaman kerajaan dahulu
- 5) Ada nilai-nilai kelestarian yang dianut masyarakat meskipun sudah tidak kuat.

Ancaman :

Beberapa faktor yang dianggap sebagai ancaman dalam mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap adalah :

- 1) Lahan kritis dalam kawasan hutan masih tinggi yaitu sebesar 43,6% dari total luas kawasan hutan
- 2) Belum semua masyarakat menyadari nilai ekonomi dari fungsi tata air sumberdaya hutan
- 3) Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
- 4) Pertumbuhan penduduk akan menekan sumberdaya hutan

C. Strategi Implementasi Aspek ekonomi

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal di atas, dirumuskan strategi untuk mengimplementasikan Pengelolaan SDH Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap melalui rumusan matriks SWOT, seperti disajikan pada Gambar 1.

		Strength (S)	Weakness (W)
		Internal	Eksternal
Eksternal	Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi Kabupaten Sidrap mendukung 2. Komitmen pemerintah mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan 3. Kewenangan pemerintah kabupaten mengatur kelembagaan kehutanan di kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan makro kabupaten yang lintas sektoral belum tersedia 2. Struktur organisasi belum operasional sampai di tingkat desa 3. Koordinasi dengan sektor lain kurang 4. Pelayanan publik di desa tidak tersedia

		5. Perencanaan kehutanan masih sektoral
<i>Opportunities (O)</i>	<i>Strategi S-O</i>	<i>Strategi W-O</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan otonomi daerah 2. Kawasan hutan fungsi lindung yang dominant 3. Ketergantungan masyarakat terhadap air untuk aktivitas usahatani tinggi 4. Keinginan masyarakat untuk mengembalikan pengurusan hutan seperti pada zaman kerajaan. 5. Ada nilai-nilai kelestarian yang dianut masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kawasan hutan lindung untuk tujuan utama produksi air dan hasil hutan bukan kayu lainnya 2. Mengembangkan kerja sama lintas kabupaten dalam penurusan sumberdaya hutan untuk produksi air. 3. Menyusun program pelestarian budaya dan tudang sipulung yang terkait dengan pelestarian fungsi hutan. 4. Menggali dan memmanfaatkan nilai-nilai yang ada dimasyarakat untuk pengembangan hutan di lokasi tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menonjolkan nilai ini dalam penyusunan program kehutanan. 2. Mengembangkan kelembagaan kehutanan sampai pada tingkat lokal, sesuai nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat.
<i>Threats (S)</i>	<i>Strategi S-T</i>	<i>Strategi W-T</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan kritis dalam kawasan hutan masih tinggi 2. Belum semua masyarakat menyadari nilai ekonomi dari fungsi tata air sumberdaya hutan 3. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah 4. Pertumbuhan penduduk akan menekan sumberdaya hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pola-pola rehabilitasi yang berbasis masyarakat 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi tata air hutan 3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan 	

Gambar 1. Matriks SWOT strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan SDH berkelanjutan di Kabupaten Sidrap

Berdasarkan matriks SWOT di atas, maka ada beberapa strategi yang dianggap penting sebagai berikut:

a. Strategi Kekuatan–Peluang (S-O)

Adalah strategi untuk memanfaatkan kekuatan agar dapat meraih peluang yang tersedia. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Pengelolaan kawasan hutan lindung untuk tujuan utama produksi air dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
- 2) Mengembangkan kerja sama lintas kabupaten dalam penelolan sumberdaya hutan untuk produksi air.
- 3) Menyusun program pelestarian budaya dan tudang sipulung yang terkait dengan pelestarian fungsi hutan
- 4) Menggali dan memanfaatkan nilai-nilai yang ada di masyarakat pada lokasi tertentu untuk pengembangan hutan di lokasi tersebut.

b. Strategi Kelemahan-Peluang (W – O)

Adalah strategi untuk menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Menonjolkan aspek ekonomi dalam penyusunan program kehutanan
- 2) Mengembangkan kelembagaan kehutanan sampai pada tingkat lokal sesuai nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat.

c. Strategi Kekuatan – Ancaman (S – T)

Adalah strategi memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman yang ada. Beberapa strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- 1) Mengembangkan pola-pola rehabilitasi yang berbasis masyarakat
- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi tata air hutan
- 3) Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Aspek Ekonomi adalah hutan dikelola sebagai penghasil air dan jasa lingkungan yang terkait dengan sumberdaya air bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi Kabupaten Sidrap dan masyarakat kabupaten lain di daerah hilirnya. Strategi implementasi dilakukan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung untuk tujuan utama produksi air dan hasil hutan bukan kayu lainnya, mengembangkan kerja sama lintas kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk produksi air, menyusun program pelestarian budaya dan tudang sipulung yang terkait dengan pelestarian fungsi hutan, menggali dan memanfaatkan nilai-nilai yang ada di masyarakat pada lokasi tertentu untuk pengembangan hutan di lokasi tersebut, menonjolkan nilai-nilai dalam penyusunan program kehutanan, mengembangkan kelembagaan kehutanan sampai pada tingkat lokal sesuai nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat, mengembangkan pola-pola rehabilitasi yang berbasis masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi tata air hutan, dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan. Disisi lain, Pembangunan kehutanan perlu menerapkan pendekatan-pendekatan lokalitas setempat. Perlu juga dilakukan restrukturisasi kelembagaan kehutanan kabupaten yang dapat menciptakan koordinasi yang intensif antar sektor terutama antara sektor kehutanan dengan sektor-sektor yang terkait dengan keairan. Serta perlu pengkajian mendalam terkait mekanisme pengelolaan bersama sumberdaya hutan di Kabupaten Sidrap dengan kabupaten lain di daerah hilirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Amri, Chairul. 2011. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Depok.
- Balana, B.B., Mathijs, E., Muys, B. 2010. *Assessing The Sustainability of Forest Management : An Application of Multi-criteria Decision Analysis to Community Forest in Northern Ethiopia*. *Journal of Environmental Management*, 91 : 1294-1304.
- Fauzi, A. 2006. *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan*. Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gurney, G.G. Cinner, J.E., Sartin, J., Pressey, R.L., Ban, N.C., Marshall, N.A., Prabuning, D. 2016. *Participation in Devolved Commons Management : Multiscale Socioeconomic Factor Related to Individuals Participation in Community-Based Management of Marine Protected Areas in Indonesia*. *Environmental Science & Policy*, 61 : 212-220.
- Hajjar, R. Kozak, R.A., El-Lakany, H., Innes, J.L. 2013. *Community Forest for Forest Communities : Integrating Community-Defined Goals and Practices in The Design of Forestry Initiatives*. *Land Use Policy*, 34 : 158- 167.
- Iskandar, U. 1999. *Menuju Hutan Lestari*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
- Jati, W. S. 2015. *Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi : Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?*. *Populasi*, 23(1) : 1-19.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik an Organisasi non Profit*. Jakarta : PT Grasindo
- Sukwika, T., D. Darusman, C. Kusmana, and D.R. Nurrochmat, 2018. *Skenario Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 8 No. 2 (Agustus 2018): 207-215